

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ISTRI YANG
DITALAK SECARA LISAN BERDASARKAN PP No 9
TAHUN 1975
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SAMPANG)**



Diajukan Oleh:

Nor Cholis

NPM: 17310016

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2019

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ISTRI YANG DI TALAK
SECARA LISAN BERDASARKAN PP No 9
TAHUN 1975
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SAMPANG)**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh :

NOR CHOLIS

NPM: 17310016

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2019

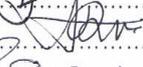
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ISTRI YANG DITALAK SECARA
LISAN BERDASARKAN PP No 9 TAHUN 1975
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SAMPANG)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nor Cholis
NPM : 17310016

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda Tangan
Dr Titik Suharti SH.M.Hum	Ketua 
Noor Tri Hastuti SH.M.,Hum	Anggota 
Prof . Dr H.Moch Isnaeni. SH.M.S	Anggota 
Dr. Dwi Tatak Subagiyo. SH.M.Hum	Anggota 

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 12 Agustus 2019
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr, Titik Suharti. S.H. M. Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ISTRI YNG DI TALAK
SECARA LISAN BERDASARKAN PP No 9
TAHUN 1975
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SAMPANG)**

Diajukan Oleh:

Nor Cholis

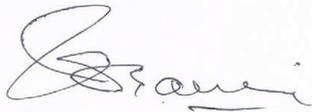
NPM: 17310016

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal: 12 Agustus 2019

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH., M.S.

Pembimbing II



Dr. Dwi Tatak Subagiyo, SH., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Istri Yang Ditalak Secara Lisan Berdasarkan PP No 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kabupaten Sampang)” telah selesai ditulis.

Penulisan tesis ini telah melibatkan banyak pihak, yang telah memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materiil. Oleh karena itulah pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak tersebut, antara lain:

1. Profesor H .Sri Harmadji ,Sp.THT-KL(LK) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr.Umi Enggarsasi,S,H .,M.Hum.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr.Titik Suharti,S,H.,M.Hum.,selaku Progam Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Bapak Prof.Dr.H. Moch. Isnaeni, SH., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dengan sabar sehingga penulisan tesis selesai dilakukan.
5. Bapak Dr.Dwi Tatak Subagiyo, SH., Mhum.selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah mencurahkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan tesis ini.

6. Dosen-dosen yang mengajar di Program Magister Ilmu hukum yang telah berbagi ilmu dan pengalaman di dalam kelas maupun di luar kelas.
7. Staf Administrasi yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menjalani pendidikan.
8. Teman sejawat yang telah belajar dengan kompak dengan penulis sehingga menambah semangat penulis.
9. Keluarga yang telah mendukung sepenuhnya penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
10. Pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca dan dapat memberikan perbaikan dalam kehidupan hukum di Indonesia. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itulah maka penulis berharap agar para pembaca dapat memberikan masukan yang membangun.

Surabaya, 9 Agustus 2019

Nor Cholis

Penyusun

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Cholis

NPM : 17310016

Alamat : Surabaya

No. Telepon : 081233445577

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Istri Yang Dijatuhi Talak Secara Lisan Berdasarkan PP No 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kabupaten Sampang)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme ataupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 9 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Nor Cholis

NPM:17310016

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	
3 Tujuan Penelitian	10
4. Manfaat Penelitian	10
5. Metode Penelitian	11
6. Kajian Teoritis	22
7 Sistematika Pertanggung jawaban.....	
BAB II TENTANG KARAKTERISTIK KEKERASAN PSIKIS YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP PEREMPUAN TAK BERKARYA DI KABUPATEN SAMPANG	23
1. Pengertian Kekerasan	23
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan	29
3. Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	33
4. Karakteristik Kekerasan Psikis Suami Terhadap Wanita di Kabupaten Sampang	35

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN TERHADAP PEREMPUAN TAK BERKARYA YANG MENDAPATKAN KEKERASAN PSIKIS DARI SUAMINYA PASCA TALAK SECARA LISAN	41
1. Perceraian dan Talak	41
2. Kewajiban Mantan Suami Terhadap Mantan Istri Setelah Perceraian	59
3. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Terhadap Perempuan Tak Berkarya Yang Mendapatkan Kekerasan Psikis Dari Suaminya Pasca Talak Secara Lisan	66
BAB IV PENUTUP	99
1. Kesimpulan	99
2. Saran	100
DAFTAR BACAAN	103

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: Mengetahui dan menganalisis karakteristik kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap perempuan tak berkarya di Kabupaten Sampang; dan Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan tak berkarya yang mendapatkan kekerasan psikis dari suaminya setelah talak secara lisan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sementara pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan salah satu permasalahan rumah tangga yang fenomenal dalam masyarakat adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang umumnya dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan/atau anaknya tersebut menjadi permasalahan yang seolah-olah tidak ada akhirnya. Salah satu jenis tindak kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan psikis. Bentuk kekerasan psikis yang terjadi di Kabupaten Sampang, salah satunya adalah pemberian talak secara lisan yang kemudian tidak ada kejelasan status karena tidak ada pengurusan administrasi akta cerai ataupun keputusan pengadilan. Hal ini tentu menyebabkan tekanan pada psikologi wanita karena statusnya tergantung tidak jelas hingga bertahun-tahun. Wanita yang tertimpa KDRT psikis dari pihak suami berupa talak secara lisan perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat diberikan secara preventif dan juga secara represif. Bukan hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab atas masalah ini. Tetapi juga masyarakat juga wajib untuk menjaga agar tidak ada lagi tindak kekerasan yang terjadi. Melihat fenomena tersebut beberapa aktivis peduli perempuan di Kabupaten Sampang berinisiatif untuk bersatu dan membentuk suatu lembaga yang menggandeng Pemerintah untuk menangani masalah kekerasan perempuan. Lembaga tersebut bernama Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pemerintah Kabupaten Sampang bekerjasama dengan P2TP2A untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi. Bentuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan P2TP2A adalah ketika ada laporan tindak kekerasan terhadap warga Kabupaten Sampang ke P2TP2A, P2TP2A bertindak sebagai pendamping korban dalam tindak penanganan kasus kekerasan yang terjadi.

Kata kunci: Perlindungan hukum, kekerasan psikis, suami, istri

ABSTRACT

The purpose of this study was to know and analyze the characteristics of psychological violence carried out by husbands against non-working women in Sampang Regency; and Know and analyze forms of legal protection that can be given to non-working women who get psychological violence from their husbands after verbal divorce. The research method used in this study is normative legal research, while the problem approach used in this study is the statutory approach (case approach), case approach (case approach) and conceptual approach (conceptual approach). Data analysis using qualitative data analysis.

The results showed that one of the phenomenal problems in the community was the occurrence of domestic violence. Violence that is generally committed by a husband to his wife and / or children becomes a problem that seems to have no end. One type of violence committed is psychological violence. One form of psychological violence that occurred in Sampang District, one of which was the provision of oral divorce which then there was no clear status because there was no administration of divorce certificate or court decision. This certainly causes pressure on the psychology of women because their status is unclear for years. Women affected by psychological domestic violence from their husbands in the form of verbal divorce need to get legal protection. Legal protection can be provided preventively and also repressively. Not only the government is responsible for this problem. But also the community is also obliged to maintain so that no more acts of violence occur. Seeing this phenomenon, some caring women activists in Sampang District took the initiative to unite and form an institution that cooperates with the Government to deal with the issue of female violence. The institution was named the Center for the Protection of Women and Children (P2TP2A). The Sampang District Government collaborated with P2TP2A to handle cases of violence that occurred. The form of cooperation between the District Government and P2TP2A is that when there are reports of acts of violence against Sampang District residents to P2TP2A, P2TP2A acts as a victim's assistant in the act of handling cases of violence that have occurred.

Keywords: *Legal protection, psychological violence, husband, wife*